

ABSTRAK

ANALISIS KESIAPAN *DIGITAL GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *SMART PROVINCE* DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RIZKI AMELIA PUTRI

Pemerintah Provinsi Lampung melalui penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 meraih urutan ketujuh SPBE terbaik di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital tersebut, yang mengindikasikan kurang optimalnya kesiapan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan *digital governance* pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan *smart province*. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam aspek tata kelola pemerintahan digital, khususnya dalam pengembangan *smart province*. Analisis terhadap hasil temuan menggunakan analisis yang mengadaptasi teori *e-readiness framework* STOPE Al-Osaimi *et al.* (2008) melalui domain utama kesiapan pemerintahan elektronik, meliputi strategi, teknologi, organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan, dengan berbagai sub-domain didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki perkembangan yang baik dalam aspek kebijakan dan regulasi, infrastruktur dasar dan penunjang TIK, kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, serta dukungan dalam mencapai SDM digital. Tantangan besar yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Lampung mencakup kelemahan dalam pemerataan implementasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas keseluruhan layanan elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum. Temuan ini menunjukkan pentingnya membentuk satuan tugas dengan kolaborasi *stakeholders* khusus *smart province*, menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang terstruktur dan berjangka panjang, membangun strategi pengembangan SDM, mendorong pemerataan infrastruktur dan akses digital, serta mengupayakan penciptaan tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan adaptif.

Kata Kunci: *Digital Governance*, *E-Readiness*, Integrasi Sistem Pemerintahan, *Smart Province*, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF DIGITAL GOVERNANCE READINESS IN LOCAL GOVERNMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF A SMART PROVINCE IN LAMPUNG PROVINCE

By

RIZKI AMELIA PUTRI

The Provincial Government of Lampung ranked seventh nationally in the 2023 Electronic-Based Government System Index, recognizing its digital governance efforts. However, in practice, various challenges persist in implementing digital government transformation, highlighting the suboptimal readiness of the regional government. This study aims to analyze the digital governance readiness of the Lampung Provincial Government in supporting the development of a smart province. A qualitative approach with descriptive analysis was employed to identify and gain an in-depth understanding of the region's preparedness in terms of digital governance, particularly in the context of smart province development. The analysis is based on the e-readiness framework of Al-Osaimi et al. (2008), which assesses five main domains of electronic government readiness: strategy, technology, organization, people, and environment, including various sub-domains within. The findings indicate that the Lampung Provincial Government has made significant progress in policy and regulation, core and supporting ICT infrastructure, collaboration with various stakeholders, and support for developing digital human resources. However, major challenges remain, including uneven policy implementation, limited cross-sector coordination, insufficient quantity and quality of human resources, lack of full-service interoperability, and unequal distribution of general technological infrastructure. These findings underscore the importance of establishing a dedicated smart province task force in collaboration with stakeholders, formulating structured and long-term policy directions, developing a human resource capacity-building strategy, promoting equitable infrastructure and digital access, and fostering a collaborative and adaptive model of digital governance.

Keywords: Digital Governance, E-Readiness, Government System Integration, Smart Province, Local Government